PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 19 / PB/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ARSIP DATA KOMPUTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

JALAN NOMOR ... TELEPON (.....) EXT. FAKSIMILE (.....)

FORMULIR PENDAFTARAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (haran diisi dengan huruf kanital)

A. Data Pribadi 1. Nama Lengkap (sesuai KTP) 2. NIP / NRP 3. Nomor KTP 4. Tempat Lahir 5. Tanggal Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Alamat tempat tinggal Kota Propinsi Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM a. Penanda Tangan SK
2. NIP / NRP 3. Nomor KTP 4. Tempat Lahir 5. Tanggal Lahir 6. Jenis Kelamin [] Laki-Laki [] Perempuan 7. Alamat tempat tinggal Kota Propinsi Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
3. Nomor KTP 4. Tempat Lahir 5. Tanggal Lahir 6. Jenis Kelamin [] Laki-Laki [] Perempuan 7. Alamat tempat tinggal Kota Propinsi Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Kota Propinsi Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
4. Tempat Lahir 5. Tanggal Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Alamat tempat tinggal Kota Propinsi Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Kota Propinsi Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
5. Tanggal Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Alamat tempat tinggal Kota Negara 8. Alamat sesuai KTP Kota Negara Negara Kota Propinsi Kode pos Propinsi Kode pos Some propinsi Negara Kode pos Negara Negara Negara Propinsi Negara Negara Propinsi Negara Negara Propinsi Negara Negara Propinsi Kode pos Some pos
6. Jenis Kelamin [] Laki-Laki [] Perempuan 7. Alamat tempat tinggal Kota Propinsi Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
7. Alamat tempat tinggal Kota Propinsi Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
Kota Propinsi Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
Negara Kode pos 8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
8. Alamat sesuai KTP Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
Kota Propinsi Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
Negara Kode pos 9. Nomor telepon rumah 10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
Nomor telepon rumah SK Pengangkatan sebagai PPSPM
Nomor telepon rumah SK Pengangkatan sebagai PPSPM
10. SK Pengangkatan sebagai PPSPM
b. Tanggal
c. Nomor
11. Nomor HP yang didaftarkan
12. Email (optional)
13. Nama Gadis Ibu Kandung
B. Data Satker
1. Kode K/L
2. Kode Bagian Anggaran
3. Nama satker
4. Kode satker
5. Tanggal DIPA
6. Nomor DIPA
VV
6. Nomor DIPA
6. Nomor DIPA
6. Nomor DIPA 7. Alamat satker Kota Propinsi
6. Nomor DIPA 7. Alamat satker Kota Propinsi



SURAT PERNYATAAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang dicantumkan pada formulir ini adalah benar dan sah serta membebaskan KPPN dari segala tuntutan pihak ketiga baik perdata maupun pidana, sehubungan dengan kesalahan/ketidakbenaran dalam pemberian informasi dan pengisian data dalam formulir ini.

2. Saya telah membaca dan memahami dan bersedia mematuhi ketentuan penggunaan PIN PPSPM sebagai tanda tangan elektronik PPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait Penggunaan PIN PPSPM dan Buku

Panduan Penggunaan PIN PPSPM.

3. Saya mengetahui semua resiko yang timbul dan mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan PIN PPSPM dalam transaksi pengeluaran negara yang saya lakukan

melalui penerbitan SPM dan ADK SPM.

4. Saya sebagai PPSPM bertanggungjawab secara formil dan materil atas penerbitan SPM dan ADK SPM yang disampaikan ke KPPN termasuk segala akibat yang timbul dari penerbitan SPM dan ADK SPM.

(Nama Kota), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)

Mengetahui Kepala Subbagian Umum KPPN Yang membuat pernyataan

Materai Rp.6.000

(Nama lengkap & NIP)

(Nama lengkap & NIP/NRP)

Keterangan:

1. Formulir ini dibuat di atas kertas karbon rangkap dua. Lembar kesatu untuk KPPN, lembar kedua untuk PPSPM.

2. Terdapat check list kelengkapan dokumen lampiran formulir registrasi yang digunakan oleh Petugas Customer Service. Check list tersebut menjadi dasar bagi Kepala Subbagian Umum untuk menandatangani permohonan registrasi.

3. Formulir ini harus dilampiri dengan:

Satu lembar fotokopi KTP (Hanya kartu identitas KTP yang dapat digunakan).

Satu lembar fotokopi SK Pengangkatan PPSPM. (seluruh fotokopi tersebut harus dicocokan dengan dokumen asli)

